

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Abd al-Hamid al-Anshari, *al-‘Alam al-Islami bayna al-Syura wa al-Dimuqrathiyah*, Cetakan ke1, Daral al-Fikr al Islam, Cairo, 1922, hal 30 dan 324.
- ‘Abd al-Karim Zaydan, *Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyarakah al-Muslim fi al-Intikhabat*, Majallah al-Majma’ al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-‘Alam al-Islami, 1426 H, hal 58-59 dan 327.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 64.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia , Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta,1995, hal 20-21.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 21.
- Dawud al-Baz, *Al-Syura wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyabiyyah*, Iskandariyah: Dar al-Fikr al-Jami’i, 2004, hal 153 dan 326-327.
- Fuady Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Retika Aditama, Jakarta, 2009, hal 37.
- George Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2014, hal 14.
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hal 148.
- Jeff Hayness, *Demokrasi di Dunia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 112.

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 201.
- \_\_\_\_\_, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 293.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 32.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 152.
- Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 8.
- Muhammad Ahmad Mufti, *Mafahim Siyasah Syar'iyah*, Daral-Basyir, Amman, 1418 H, hal 50.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 19.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 208.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi Cet 11, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal 261.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, Hal 120.
- Paadmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 17.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, hal 95.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal 72.

- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 46.
- Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Liberty , Yogyakarta, 1983, hal.53-54.
- Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Cetakan Pertama, Gozian Press, Jakarta, 2013, hal 304-305.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 4.
- Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, LabHukum UM, Yogyakarta, 2009, hal 47.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Mengganti Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Cetakan Pertama, UII Pres, Yogyakarta, 2001, hal 25.
- Shalah al-Din Dabbus, *Al-Khalifah Tawliyatuh wa 'Azluh*, Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqafiyyah al-Jami'iyah, hal 243-244.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 17.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hal 52.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Pengantar Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hal 14
- Thoha Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 73.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*

*Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.  
67.

Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*,  
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta,  
2013, Hal 1.

## **UNDANG-UNDANG**

*Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilu  
Presiden dan Wakil Presiden.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 Tentang  
penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

*Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.*

## **INTERNET**

Attu Bellah, *Pemilihan Umum*, [http://www.academia.edu/5848234/Pemilihan-  
umum](http://www.academia.edu/5848234/Pemilihan-umum) , di akses pada 30 Oktober 2017

Cara mengatasi Black Campaign, <http://Kabarkito.blogspot.co.id/2013/01/cara-campaign.html?m>, di akses 31 Oktober 2017

<http://perludem.org/2013/12/06/mahkamah-konstitusi-bukan-mahkamah-kalkulator/>, di akses pada 1 Februari 2018.

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFg hTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil\\_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkj uvplUZ](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFg hTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkj uvplUZ), di akses pada 3 Maret 2018.